



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
2020

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG
2021

DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C. Struktur Organisasi	3
	D. Susunan Organisasi	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	5
	A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	5
	B. Strategi dan Kebijakan	6
	C. Program dan Kegiatan	7
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	9
	A. Capaian Kinerja Organisasi	9
	B. Realisasi Anggaran	66
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	68

IKHTISAR EKSEKUTIF

Good Governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban amanah atau mandat yang melekat pada suatu Pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja (PK) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan landasan pemikiran tersebut, LKjIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2020 ini disusun. LKjIP menyajikan capaian kinerja dari BAPPEDA Kota Padang Panjang selama tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan Penetapan Kinerja BAPPEDA Tahun 2020. Keberhasilan pelaksanaan beberapa kegiatan di BAPPEDA Kota Padang Panjang ini tentunya juga berkat dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga serta partisipasi semua pihak secara umum.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini menjadi catatan bagi BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja di masa mendatang, sehingga apa yang menjadi Tupoksi serta tujuan dan sasaran BAPPEDA dapat diwujudkan.

Padang Panjang, 28 Februari 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



RUSDianto, S.IP MM.

Pembina Utama Muda/NIP. 19640402 198602 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini mewajibkan setiap Kepala OPD untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penetapan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2020 serta pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang dikelolanya. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020, maka BAPPEDA Kota Padang Panjang berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020, sesuai dengan Refocusing ke-empat dan Perubahan Anggaran Tahun 2020.

LKjIP BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2020 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program dan kegiatan yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Maksud penyusunan LKjIP BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2020 adalah memberikan informasi yang akuntabel dan transparan mengenai pertanggungjawaban keberhasilan BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pencapaian dari penetapan kinerja pada tahun 2020, yang dilaksanakan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai perwujudan akutabilitas BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang mempunyai dua kedudukan, yakni :

1. BAPPEDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah
2. BAPPEDA sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

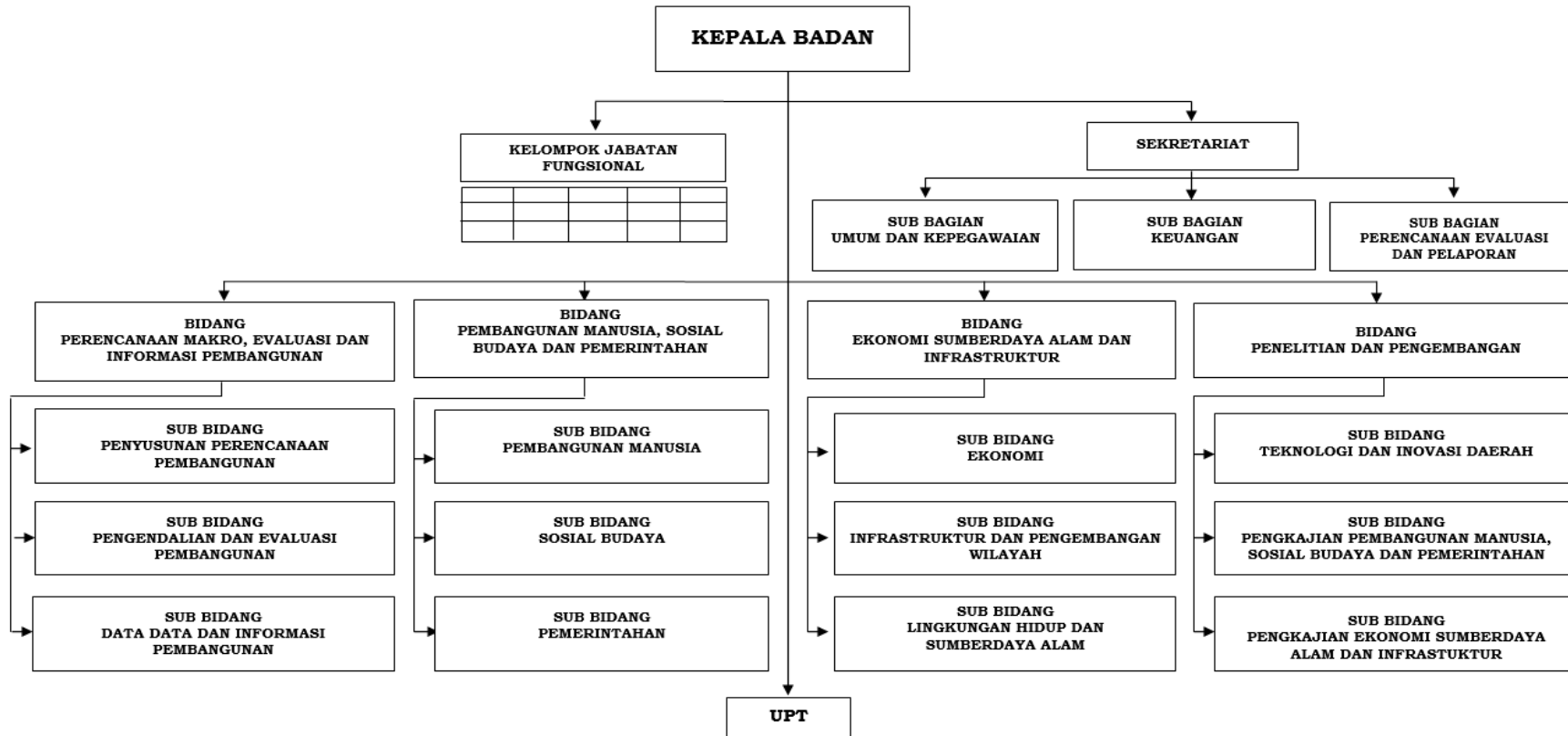
Kepala BAPPEDA mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG



D. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.
4. Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan.
5. Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknologi dan Inovasi Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
 - c. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur.
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, BAPPEDA Kota Padang Panjang didukung oleh 41 (empat puluh satu) orang personil yang terdiri 9 (Sembilan) orang Golongan IV, 17 (tujuh belas) orang Golongan III, 6 (enam) orang Golongan II, dan 9 (sembilan) orang tenaga harian lepas.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan BAPPEDA Kota Padang Panjang periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator kinerja masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	70 %	74 %	78 %	82 %	85 %

B. Strategi dan Kebijakan

Setelah ditetapkannya tujuan dan sasaran, maka dirumuskan juga strategi dan kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai target yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah
		Peningkatan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah	Peningkatan pelaksanaan, Program yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah
			Membangun jejaring kerjasama kelembagaan dengan stakeholders terkait

C. Program dan Kegiatan

Anggaran Belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2020, keadaan akhir tahun setelah perubahan anggaran yakni Rp. 1.415.344.423,-. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket.
1	2	4	5
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	639.550.923	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	137.061.064	
2.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	164.210.520	
3.	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.182.189	
4.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	167.021.000	
5.	Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat	89.921.050	
6.	Penyediaan Komponen Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	61.155.100	
II.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	82.600.000	
7.	Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	82.600.000	
III.	Pengembangan Data/Informasi	102.072.500	
8.	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	6.397.500	
9.	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan	95.675.000	
IV.	Perencanaan Pembangunan Daerah	183.380.000	
10.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	3.025.000	
11.	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	14.935.000	
12.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Perubahan	18.895.000	
13.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai APBN	11.700.000	
14.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD)	64.475.000	
15.	Fasilitasi Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah	67.800.000	
16.	Penyusunan Kalender Perencanaan	2.550.000	
V.	Penelitian dan Pengembangan	0	
17.	Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis	0	

1	2	4	5
VI.	Perencanaan Sosial dan Budaya	98.615.000	
18.	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	50.220.000	
19.	Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	20.225.000	
20.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan PUG	28.170.000	
	Penguatan Inovasi Daerah	236.065.000	
21.	Penguatan Sistem Jaringan Inovasi Daerah	236.065.000	
	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	73.061.000	
22.	Fasilitasi Pelaksanaan SATIMISAKE	21.857.000	
23.	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi	10.004.000	
24.	Pengembangan dan Updating GIS	41.200.000	
	Jumlah	1.415.344.423	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Tupoksi BAPPEDA Kota Padang Panjang seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya dan sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2020, maka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan seluruh program kegiatan pada BAPPEDA Kota Padang Panjang dicapai dengan sasaran yakni :

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Target evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja sasaran yakni, persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar 74%.

**Tabel 3.1.
Capaian Kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang
Tahun 2020**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	74%	48,57%	65,64%

Dari gambaran pada tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2020 capaian kinerja belum tercapai sesuai target karena dipengaruhi berbagai faktor antara lain menurunnya pencapaian indikator makro daerah, sebagai dampak pandemic Covid-19.

$$\sum \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right)$$

$$= \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Indikator}}$$

Ket : Jumlah persentase capaian indikator sasaran daerah terhadap target tahun ke -n / jumlah indikator sasaran daerah

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Daerah pada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	TAR GET	REALI SASI	% CAPAI AN
1	2	3	4	5	6	7
I.	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNGGULAN DAERAH BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
T1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,04	-1,09	-18,05
S1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,17	1,29	40,69
		1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	5,24	-1,01	-19,27
		1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	2,33	-2,41	-103,43
		1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	-12,04	-156,98
S2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	1.2.1	Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	0,75	1,15	153,33
		1.2.2	IKLH	65,52-66,84	64,77	98,86

1	2	3	4	5	6	7
T2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2.	PDRB Perkapita	50,42	61,33	121,64
S3.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan	2.3.1	Angka Kemiskinan	5,03	5,24	95,99
		2.3.2	Indeks Gini	0,27	0,394	68,53
S4.	Menurunnya Angka Pengangguran	2.4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,72	6,44	73,29
S5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	2.5.1	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10,31	10,734	104,11
II.	MENINGKATKAN PEMERATAAN KUALITAS DAYA SAING SDM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA					
T3	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Yang Sehat, Berakhlak dan Unggul	3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,86	77,93	98,82
S6	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	3.6.1	Rata-Rata Lama Sekolah	12,11	11,62	95,95
		3.6.2	Harapan Lama Sekolah	15,38	15,06	97,92
S7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.7.1	Angka Harapan Hidup	72,47	72,82	100,48
T4.	Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram dan Agamais	4.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	97,28	100	102,80
S8	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.8.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	97,28	100	102,80
S9	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	4.9.1	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	2,04	10,42	19,58
S10.	Meningkatnya aktivitas keagamaan dimasyarakat	4.10.1	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di masjid	56,58	46,04	81,37

1	2	3	4	5	6	7
III	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, INOVATIF DAN PARTISIPATIF					
T5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	5	Indeks Reformasi Birokrasi	64	63,49	99,20
S11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	5.11.1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (65)	B (60,64)	100
		5.11.2	Opini BPK	WTP	WTP	100
S12	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	5.12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 (Baik)	88,62 (Baik)	112,18
T6	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	6	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2,31	2,32	100,43
S 13	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	5.13.1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	75%	100%	133,33
S14	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	5.14.1	Indeks Pemberdayaan Gender	78,90	74,45	94,36

Ket : tulisan warna merah, data terbaru belum rilis

Selanjutnya berdasarkan hasil ketercapaian sasaran daerah diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Pemerintah Kota Padang Panjang secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 3 misi, 6 tujuan dengan 14 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja sasaran.

1. MISI I “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan”

Demi mewujudkan misi tersebut perlu ditingkatkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan 2 (dua) tujuan. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan 1 : Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan

Pengembangan Ekonomi Daerah yang berbasis potensi unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global. Peningkatan daya saing ekonomi juga tidak lepas dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, selaras dengan pemajuan aktifitas rakyat dalam penghasilan produk-produk unggulan daerah dibidang pertanian, peternakan, industri, perdagangan dan berbagai karya lokal sesuai potensi yang ada. Hasil evaluasi capaian kinerja Tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar -18,05% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Tujuan I. Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,96	5,59	93,79	6,04	-1,09%	-18,05%	6,30

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi belum mencapai target. Dimana target tahun 2020 sebesar 6,04% dengan realisasi hanya -18,05% jadi capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar -18,05% dengan kriteria sangat rendah. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun lalu, dimana tahun 2019 target 5,96% dengan realisasi

5,59% jadi capaian kinerja sebesar 93,79%. Hal ini mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2020 disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia sehingga berpengaruh terhadap sektor perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini juga berimbas melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 2,97. Sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat adalah 1,29.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang yang belum optimal yang ditandai pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi. Untuk itu diperlukan ditingkatkan daya saing ekonomi unggulan daerah yang berbasis kerakyatan. Dalam hal ini yang menjadi yang menjadi unggulan daerah adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pariwisata dan industri. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,05	3,67	120,33	3,17	1,29	40,69	3,56
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	5,02	5,28	105,17	5,24	-1,01	-19,27	5,92
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	2,28	-2,74	-120,17	2,33	-2,41	-103,43	2,46
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor	7,61	7,23	95,01	7,67	-12,04	-156,98	7,86

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah 1,29% lebih rendah 1,88% dibandingkan target 3,17%. Dengan demikian capaian indikator ini tahun 2020 adalah 40,69% atau tidak mencapai target dengan kriteria rendah. Dibandingkan dengan target akhir yang terdapat dalam RPJMD, yang sebesar 3,56%, maka dapat dikatakan bahwa capaian ini tidak mencapai target sebesar 36,24%. Berbeda dengan tahun 2019 target tahun 3,05% dengan realisasi hanya 3,67% jadi capaian kinerja sebesar 120,33%. Hal ini mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2020 disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia sehingga berpengaruh terhadap sektor perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran adalah -1,01% lebih rendah 6,25% dibandingkan target sebesar 5,24%. Dengan demikian capaian indikator ini tahun 2020 adalah -19,27% atau tidak mencapai target, dengan kriteria sangat rendah. Dibandingkan dengan target akhir yang terdapat dalam RPJMD, yang sebesar 5,92%, maka dapat dikatakan bahwa capaian ini masih di bawah target sebesar 6,93%. Berbeda dengan tahun 2019 target tahun 5,02% dengan realisasi hanya 5,28% jadi capaian kinerja sebesar 105,17%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan di sektor perdagangan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Untuk tahun 2020 hal ini mengalami penurunan yang sangat drastis disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia sehingga berpengaruh terhadap sektor perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri adalah -2,41% lebih rendah 4,74% dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 2,33%. Dengan demikian capaian indikator ini tahun 2020 adalah -103,43% atau tidak mencapai target, dengan kriteria rendah. Dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD, yang sebesar 2,46%, maka dapat dikatakan bahwa capaian ini masih

jauh di bawah target sebesar 4,87%. Sama halnya dengan tahun 2019 target tahun 2,28% dengan realisasi hanya -2,74% jadi capaian kinerja sebesar -120,17%. Kegagalan pencapaian target ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Diantaranya adalah lesunya perkembangan global pada sejumlah industri unggulan Kota Padang Panjang. Salah satunya adalah industri kulit yang selama ini menjadi andalan Kota Padang Panjang, nyaris tidak mampu bergerak banyak sepanjang Tahun 2019 karena memang bisnis kulit secara nasional maupun global mengalami penurunan yang sangat drastis. Di sisi lain, industri pengolahan kapur juga mengalami kendala dari sisi legalisasi bahan baku sehingga tidak dapat beroperasi secara maksimal. Upaya yang perlu dilakukan di sektor ini ke depan adalah membantu meningkatkan kapasitas pelaku industri Kota Padang Panjang baik dari sisi keterampilan produksi, modal maupun pemasaran.. Sedangkan untuk tahun 2020 hal ini mengalami penurunan yang sangat drastis disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia sehingga berpengaruh terhadap sektor perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah -12,04% lebih rendah 19,71% dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 7,67%. Dengan demikian capaian indikator ini tahun 2020 adalah -156,98% dengan kriteria rendah. Dibandingkan dengan target akhir yang terdapat dalam RPJMD, yang sebesar 7,86%, maka dapat dikatakan bahwa capaian ini masih di bawah target sebesar 19,9%. Hal ini mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2020 disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia sehingga berpengaruh terhadap sektor perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan

energi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Kondisi saat ini sebagian infrastruktur Kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan misalnya dalam hal penyediaan air bersih yang belum menyentuh seluruh warga kota, tempat parkir yang sangat terbatas seperti di pasar pusat, terminal yang belum berfungsi dengan baik, sistem drainase yang tidak baik sehingga sebagian wilayah Kota Padang Panjang tergenang air jika terjadi hujan yang cukup lama, sistem air limbah kota yang belum terpadu. Permasalahan lainnya terkait infrastruktur kota juga belum adanya standarisasi dari infastruktur, seperti trotoar yang tidak standar dan tidak ramah disabilitas dan lansia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan maka permasalahan lingkungan hidup menjadi suatu hal yang menjadi perhatian, dengan semakin pesatnya pembangunan tentu akan berdampak kepada kualitas lingkungan hidup. Beberapa permasalahan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang antara lain masih tingginya pencemaran air sungai, sampah dan penyediaan ruang terbuka hijau. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastrukstur Berkelanjutan** dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5.
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Infrastrukstur Berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase kenaikan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	0,50	-	0%	0,75	1,15	153	1,50

2.	IKLH	65,25-66,57	64,77	98,27	65,52-66,84	64,77	98,27	66,33-67,65
----	------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------	-------------

Sumber Data: Setdako Tahun 2019, Dinas Perkim dan LH Kota Padang Panjang Tahun 2019 (Data IKLH 2020 belum rilis)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator Persentase Kenaikan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kota Padang Panjang yang dimulai pada tahun 2019 namun tidak ada realisasinya dengan target 0,50% sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja. Dibandingkan dengan IKLI tahun 2020 adalah 1,15% lebih tinggi 0,4% dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 0,75%. Dengan demikian capaian indikator ini tahun 2020 adalah 200% atau melebihi target, dengan kriteria tinggi.

IKLH Kota Padang Panjang pada tahun 2020 adalah 64,77% dengan target yang ditetapkan sebesar 65,25-66,57%, dengan demikian capaian indikator adalah 98,27% atau dibawah target, dengan kriteria rendah. IKLH tahun 2020 pun mengalami sama dengan tahun 2019 sebesar 66,31. Tetapi capaian kinerja tahun 2018 sebesar 95 % mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 98,27 %. Dari survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Padang Panjang Tahun 2019 didapatkan nilai kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Hasil Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Kota Padang Panjang Tahun 2019

No	Survey	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	81,84	B	Baik
2.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Perhubungan	70,14	C	Kurang Baik
3.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan, Lampu Penerang jalan dan Trotoar)	76,05	C	Kurang Baik
4.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pasar, Islamic Center dan Ruang Hijau Publik)	66,72	C	Kurang Baik
5.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	75,14	C	Kurang Baik
6.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar	70,22	C	Kurang Baik

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2019 (Data tahun 2020 belum rilis)

Dari tabel di atas hasil survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang dilaksanakan atas kerjasama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dan Universitas Andalas hanya Indeks Layanan Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkinerja **Baik** sementara Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Perhubungan, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan, Lampu Penerang jalan dan Trotoar) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pasar, Islamic Center dan Ruang Hijau Publik), Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar berkinerja **Kurang Baik**. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dijadikan salah satu indikator keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rekomendasi perbaikan 6 jenis layanan infrastruktur untuk Pemerintah Kota Padang Panjang adalah :

1. Layanan Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:
 - a. Memberikan layanan informasi terkait dengan penggunaan *wifi* milik pemerintah(kata sandi terbuka untuk masyarakat yang ingin mengakses);
 - b. Meningkatkan kapasitas kecepatan jaringan *wifi*;
 - c. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman untuk area yang memiliki ketersediaan *wifi*;
2. Layanan Infrastruktur Dinas Perhubungan
 - a. Inventarisasi kondisi kelayakan seluruh rambu lalu lintas;
 - b. Memperbaiki rambu lalu lintas yang mengalami kerusakan;
 - c. Peletakan rambu lalu lintas pada tempat strategis dan mudah dilihat masyarakat;
 - d. Pembedaan tata letak jarak rambu yang lokasinya berdekatan agar tidak membingungkan.
 - e. Melakukan renovasi cat ulang bagi marka jalan yang memudar dan hilang.
 - f. Melakukan pengecoran lokasi parkir yang berlubang yang terdapat pada area publik;

- g. Memberikan papan informasi petunjuk lokasi tempat parkir;
 - h. Memberikan peringatan dan hukuman bagi masyarakat yang parkir sembarang tempat;
 - i. Menata ulang lahan parkir yang tersedia;
 - j. Menyediakan juru parkir dan area parkir untuk pasar;
 - k. Memberikan papan informasi petunjuk sarana-sarana yang diperlukan untuk Disabilitas;
 - l. Memperhatikan kelayakan sarana disabilitas yang tersedia
3. Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan, Lampu jalan, dan Trotoar
- a. Melakukan pendataan jalan utama area kelurahan yang belum dilengkapi trotoar;
 - b. Pembangunan trotoar baik ruas kiri dan kanan jalan, terutama jalan utama;
 - c. Memperbaiki trotoar yang rusak akibat akar pohon;
 - d. Menindak masyarakat yang menggunakan trotoar untuk berjualan dan parkir.
 - e. Mempercepat penyelesaian drainase;
 - f. Menyediakan papan informasi terkait fungsi drainase yang dipajang di area bangunan drainase;
 - g. Penggarukan dan pembersihan sampah yang tersumbat pada drainase secara berkala;
 - h. Membuat papan larangan membuang sampah kedalam drainase;
 - i. Membuat papan petunjuk sarana penunjang layanan disabilitas.
4. Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pasar, *Islamic Centre*, Ruang Hijau Publik
- a. Penataan ulang area kios pedagang;
 - b. Membuat Pintu masuk pasar di semua sisi gedung bangunan pasar;
 - c. Himbauan kepada pedagang agar menjaga kebersihan pasar;
 - d. Perbaiki toilet di area pasar.
 - e. Memberikan papan informasi petunjuk sarana disabilitas yang terdapat di Islamic
 - a. Centre dan Ruang Hijau Publik ;
 - f. Menciptakan ruang hijau publik disetiap kelurahan;
 - g. Penggunaan Islamic Centre untuk kegiatan keagamaan
 - h. Membuat media edukasi terkait keagamaan sebagai prasarana layanan tambahan
 - a. Bagi masyarakat

- i. Memperbaiki sarana fasilitas disabilitas di ruang hijau publik agar muat kursi roda.
 - j. Menjadikan *Islamic Centre* sebagai pusat kegiatan keagamaan
5. Layanan Infrastruktur Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
- a. Himbauan kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya;
 - b. Menginventarisasi kelayakan bak sampah dan tempat sampah penampungan warga;
 - c. Mendistribusikan letak bak sampah merata dan sama jaraknya di setiap pemukiman warga terutama yang jauh dari kota;
 - d. Menertibkan masyarakat yang membuang sampah sembarangan;
 - e. Mensosialisasikan pentingnya saluran limbah terhadap masyarakat;
 - f. Memperhatikan kualitas bahan bangunan untuk rumah layak huni.
6. Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Kota Padang Panjang
- a. Penataan ulang semua kios dan tidak ada lagi pedagang kaki lima yang berada
 - b. dilantai dasar (Terutama Blok B dan Blok C);
 - c. Memperbaiki toilet pengunjung di blok B dan blok C (Air sering mati , sehingga
 - d. toilet sering kumuh);
 - e. Pembukaan akses jalan dari setiap sisi bangunan gedung pasar;
 - f. Perbaikan saluran limbah blok daging, ikan, dan ayam di gedung B lantai 1 dan
 - g. gedung C lantai 1;
 - h. Evaluasi kinerja petugas kebersihan pasar
 - i. Perbaikan untuk kios yang retak drolling door yang macet di blok C lantai 2

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang Tahun 2020 sebesar 64,77. Capaian tersebut berada dibawah target dan mengindikasikan penurunan kualitas lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran kondisi kualitas lingkungan yang terdiri dari komponen air, udara dan tutupan lahan. IKLH didapatkan dari 30% indeks kualitas air (IKA), 30% indeks kualitas udara (IKU) dan 40% indeks tutupan lahan (IKTL).

Jika ditelaah dari indeks masing-masing komponen maka rendahnya IKLH lebih dipengaruhi oleh IKA. Dari target 40,50-41,40, realisasinya hanya 37,37 (kategori rendah). Sementara untuk IKU tergolong baik/tinggi (91,52), dan IKTL 65,26 termasuk kategori sedang.

Dibandingkan dengan IKLH Tahun 2018, indeks kualitas lingkungan pada Tahun 2019 lebih rendah. Artinya pada Tahun 2019 terjadi penurunan kualitas lingkungan di Kota Padang Panjang jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Penurunan yang signifikan terjadi pada kualitas kualitas air. Sementara kualitas udara dan tutupan lahan relatif stabil.

Mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, IKLH jangka menengah ditargetkan sebesar 66,33-67,65. Dengan target tersebut maka dibutuhkan upaya cukup besar terutama untuk perbaikan kualitas air. Mengingat keberhasilan capaian ini memerlukan dukungan semua pihak, maka diperlukan penguatan koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan yang mengarah pada perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Di tingkat nasional, IKLH Tahun 2019 ditargetkan sebesar 66,5-68,5 (Renstra KLHK 2014-2019). Target tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target IKLH Padang Panjang. Target IKLH Padang Panjang ditetapkan lebih rendah dengan mempertimbangkan kondisi fisik sungai dan kecenderungan data dari tahun ke tahun. Secara nasional target IKLH ditentukan oleh target IKA sebesar 55 IKU 84 dan IKTL 62. Dari target masing-masing indikator terlihat bahwa target untuk kualitas air Kota Padang Panjang lebih rendah dari target nasional. Namun target kualitas udara kota lebih tinggi dibandingkan target nasional, karena kecenderungan yang terjadi selama ini kualitas udara di Padang Panjang relatif baik. Untuk indeks kualitas tutupan lahan, indeks Kota Padang Panjang juga sedikit lebih tinggi dari indeks nasional karena keberadaan hutan yang cenderung tidak mengalami perubahan.

Tidak tercapainya target IKLH Tahun 2019 dipengaruhi oleh penurunan kualitas air. Rendahnya kualitas air ini terdeteksi pada sungai-sungai yang melintasi kota, bahkan sejak dari bahagian hulu yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Beberapa sumber utama yang berkontribusi pada pencemaran sungai-sungai di Kota Padang Panjang antara lain sektor domestik

(rumah tangga), industri, pertanian/peternakan dan perdagangan. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi baku mutu dari masing-masing sektor menjadi penyebab utama pencemaran. Parameter uji yang paling tinggi tingkat cemarannya adalah *Ecoli* dengan konsentrasi mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat melebihi baku mutu. Bakteri *Ecoli* biasanya bersumber dari tinja manusia maupun kotoran ternak.

Sumber pencemar yang beragam memberi kontribusi terhadap tingginya pencemaran air. Selain itu tingkat pencemaran yang tinggi sudah terdeteksi sejak dari bagian hulu yang berbatasan dengan wilayah kabupaten tetangga. Artinya dibutuhkan upaya penanganan yang menyeluruh, terpadu serta melibatkan semua stakeholder termasuk pengembangan kerjasama dengan daerah tetangga.

Dari segi kebijakan, Pemerintah Daerah telah menyepakati Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang wajib dijadikan acuan dalam berbagai perencanaan pembangunan di daerah. Selanjutnya berbagai perencanaan daerah seperti RPJMD ataupun RTRW juga mesti dilengkapi dengan suatu Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diakomodir pada masing-masing perencanaan.

Pada tataran proyek atau pembangunan fisik, agar tanggung jawab pengendalian dampak berjalan dengan baik, maka setiap usaha dan/atau kegiatan harus dilengkapi dengan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan (setingkat Amdal atau UKL-UPL) pada prinsipnya berisi kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berasal dari pernyataan pemrakarsa sendiri. Oleh karena itu dokumen tersebut dijadikan instrumen untuk melakukan pengawasan apakah pemrakarsa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan seperti yang dinyatakan dalam dokumen lingkungannya. Berdasarkan hasil pengawasan 2019, didapatkan tingkat ketaatan teknis yang masih rendah yaitu sebesar 29,11% .

Selain izin lingkungan ada instrumen lain yang digunakan pada saat pengawasan yaitu SPPL. Dokumen ini merupakan pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha mikro kecil dan jumlahnya jauh lebih

banyak dari usaha dan/atau kegiatan yang wajib Izin Lingkungan. Terhadap objek ini tingkat ketaatannya diukur secara lebih sederhana dan hasil pengawasan menunjukkan tingkat ketaatan yang lebih baik yaitu 56%.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga mempengaruhi kualitas lingkungan hidup terutama pencemaran air. Limbah tinja manusia yang langsung dibuang ke sungai, sampah rumah tangga yang masuk ke badan air dan limbah cair usah/kegiatan yang dialirkan langsung ke badan sungai tanpa melalui pengolahan yang sesuai aturan mengakibatkan turunnya indeks kualitas air yang merupakan salah satu komponen perhitungan indeks kualitas lingkungan. Oleh karena itu telah dilakukan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan lingkungan berupa pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola dampak usaha dan/atau kegiatannya. Selain itu juga telah dilakukan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan terhadap ketaatan masyarakat dan pelaku usaha ini berupa kegiatan pengawasan yang melibatkan petugas lintas OPD terkait dan aparat penegak hukum.

Untuk pengukuran kualitas lingkungan hidup, telah dilakukan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan (air, udara, tanah). Data hasil pemantauan dan pengujian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan.

Selain itu, pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dapat membantu mengurangi masalah persampahan yang mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan hidup. Selain itu yang tidak kalah penting adalah kerjasama dan koordinasi dari seluruh stake holder terkait dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan.

Tingkat kualitas lingkungan didukung oleh beberapa program baik yang terkait langsung, maupun tidak langsung. Program yang mendukung tingkat kualitas lingkungan yaitu :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan. Dalam program ini terdapat kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Persampahan yang menyediakan sarana prasarana persampahan yang memadai serta operasional pembiayaan personil pengelola sampah mulai dari penyapuan, pengangkutan, pembersihan saluran dan operasional di TPA sampah. Selain itu terdapat kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan yang melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat terkait pengelolaan persampahan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Dalam program ini terdapat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan yang memberikan sosialisasi terkait peningkatan kualitas lingkungan terhadap kader lingkungan dan masyarakat.

b. Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil evaluasi capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kesejahteraan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sebesar 134.36 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7.
Tujuan 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	PDRB Perkapita	48,19	64,75	134,36	50,42	61,33	121,62	58,05

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator **PDRB Perkapita** terealisasi sesuai dengan target. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 128,42% dengan kriteria sangat tinggi. PDRB Perkapita Kota Padang Panjang Tahun 2020 sebesar Rp. 64,75 juta, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 60,36 juta. Meningkat PDRB Perkapita Kota

Padang Panjang terjadi sebagai dampak dari berbagai faktor. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap tersebut adalah lebih tingginya pertumbuhan PDRB dibandingkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan PDRB mencapai 5,59% sedangkan pertumbuhan penduduk hanya 1,32%. Pertumbuhan PDRB yang sangat signifikan tersebut diiringi dengan rendahnya inflasi pada Tahun 2019 yaitu hanya, 1,66%. Pertumbuhan PDRB terbesar disumbangkan oleh Lapangan Usaha Jasa Pendidikan (9,33%), diikuti oleh Jasa Lainnya (9,27%), informasi dan komunikasi (8,33%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,23%) dan Transportasi dan Pergudangan (7,05%).

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat** ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

3) Sasaran Strategis 3 : Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan

Masalah kemiskinan dan kesenjangan menjadi isu strategis baik di daerah maupun nasional, karena masih banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Pada 4 tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Padang Panjang menunjukkan kecenderungan penurunan angka kemiskinan. Sementara untuk Indeks Gini mengalami fluktuasi. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran masing-masing sebesar 95,99% dan 68,53% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8.
Sasaran Strategis 3 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Angka Kemiskinan	5,45	5,60	97,25	5,03	5,24	95,99	3,75
2.	Indeks Gini	0,28	0,322	85	0,27	0,394	68,53	0,24

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan belum mencapai target. Indikator dari

sasaran strategis ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat membandingkan capaian kerjanya. Pada tahun 2019, capaian kinerja untuk indikator Angka Kemiskinan adalah 97,25%. Sedangkan indikator Indeks Gini capaian kerjanya adalah 85%. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang diketahui bahwa Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2020 sebesar 5,60 berkurang dari tahun 2019 sebesar 0,36. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sementara penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sebagaimana telah di sampaikan bahwa Garis Kemiskinan itu sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi. Tahun 2017 ini angka kemiskinan di Kota Padang Panjang turun menjadi 6,17, tahun 2018 angka kemiskinan menjadi 5,88, tahun 2019 angka kemiskinan menjadi 5,60, dan tahun 2020 angka kemiskinan menjadi 5,24. Pada tahun 2017 penduduk miskin Kota Padang Panjang sebanyak 3.220 orang. Pada tahun 2018 menurun menjadi 3.110 orang dan pada tahun 2019 penduduk miskin Kota Padang Panjang turun menjadi 3.000 orang.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Karena selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Berikut disajikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Penduduk miskin di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Padang Panjang dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kota Padang Panjang Tahun 2017-2019

No	Tahun	P1	P2
1	2017	0.94	0.22
2	2018	0.88	0.22
3	2019	0.53	0.09

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019 (Data tahun 2020 belum rilis)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Padang Panjang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan mengindikasikan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengindikasikan semakin rendahnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Apabila dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2018 Kota Padang Panjang berada pada peringkat 8, sedangkan pada tahun 2019 Kota Padang Panjang berada pada peringkat 5. Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan apabila dibandingkan dengan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 Kota Padang Panjang berada pada peringkat 8, sedangkan pada tahun 2019 Kota Padang Panjang berada pada peringkat 5.

Indeks Gini

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Tingginya ketimpangan pendapatan atau kemiskinan relatif berarti kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang paling sering digunakan adalah koefisien Gini (Gini Ratio) dan kriteria Bank Dunia.

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Secara umum angka Indeks Gini berada pada kisaran nilai 0 (nol) hingga 1 (satu). GR bernilai 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan GR bernilai 1 (satu) menunjukkan

ketimpangan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan demikian GR di upayakan agar mendekati 0 (nol). Hal ini dilakukan untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Jadi semakin besar nilai Gini Ratio, semakin besar ketidakmerataan distribusi pendapatan. Berikut ini Indeks Gini Kota Padang Panjang dari Tahun 2017 s.d Tahun 2019

Tabel 3.10.
Indeks Gini Kota Padang Panjang Tahun 2017-2019

No	Tahun	Gini Ratio
1	2017	0.300
2	2018	0.290
3	2019	0.322

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019 (Data tahun 2020 belum rilis)

Dari tabel diatas terlihat bahwa Gini Ratio Kota Padang Panjang Tahun 2017 sebesar 0,300 yang artinya distribusi pendapatan Kota Padang Panjang berada pada tingkat ketimpangan sedang. Keadaan ini mengalami sedikit perubahan pada tahun 2018 dimana Indeks Gini Kota Padang Panjang mengalami penurunan menjadi 0,290 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 0,322.

Pada kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Hasil penghitungan distribusi pendapatan Kota Padang Panjang menurut kriteria Bank Dunia menunjukkan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan Kota Padang Panjang selama tahun 2017-2019 berturut-turut sebesar 21,64 persen, 37,29 persen, dan 20,53 persen. Berikut ini gambaran distribusi pendapatan Kota Padang Panjang menurut Bank Dunia :

Tabel 3.11.
Distribusi Pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2017-2019

No	Kriteria Pendapatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	20 % Teratas	38.83	21.35	40.40
2.	40 % Menengah	39.53	41.36	39.08
3.	40 % Terbawah	21.64	37.29	20.53

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019 (Data tahun 2020 belum rilis)

Hal ini perhitungan Gini Ratio yang menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan Kota Padang Panjang mengalami peningkatan pada tahun 2019 yang menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat Kota Padang Panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi Menurunnya Angka Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Padang Panjang adalah :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan PMKS melalui pemberian bantuan pangan non tunai baik melalui dana APBD maupun dana APBN serta
2. Pengembangan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin perkotaan
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat melalui pelaksanaan program Keluarga Harapan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Pertanian. Program ini dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Padang Panjang. Bantuan ini diberikan kepada KK miskin yang termasuk dalam Basis Data Terpadu. Bantuan kepada KK miskin berupa pemberian termak sapi sebanyak 8 KK masing-masing 2 ekor, ternak itik sebanyak 3 KK masing-masing KK mendapatkan 100 ekor, ternak kambing sebanyak 6 KK masing-masing KK mendapatkan 3 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan.
5. Program Kewirausahaan Bagi Masyarakat Miskin. Program ini dikelola oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM. Program ini merupakan pemberian bantuan perbaikan warung beserta isi kepada 30 KK miskin yang termasuk dalam Basis Data Terpadu. Sebelum mendapatkan bantuan tim melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan bahwa KK tersebut layak untuk diberikan bantuan.
6. Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Berprestasi. Program ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini ditunjang oleh Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Khusus Murid dari Kartu Indonesia Pintar.

7. Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman. Program ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Lingkungan Hidup. Bantuan bedah Rumah diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sumber dana Bedah Rumah berasal dari DAK dan dana dari Badan Stimulasi Perumahan Swadaya Provinsi Sumatera Barat. Bantuan dari DAK sebanyak 100 unit rumah tersebar pada 5 Kelurahan yaitu : 20 unit rumah di Kelurahan Guguk Malintang, 20 unit rumah di Kelurahan Guguk Malintang, 20 unit rumah di Kelurahan Silaing Bawah, 20 unit rumah di Kelurahan Silaing Atas, 20 unit rumah di Kelurahan Koto Panjang, 20 unit rumah di Sigando. Sumber dana Bedah Rumah berasal dari dan dana dari Badan Stimulasi Perumahan Swadaya Provinsi Sumatera Barat. Bantuan Badan Stimulasi Perumahan Swadaya Provinsi Sumatera Barat sebanyak 100 unit rumah tersebar pada 5 Kelurahan yaitu : 20 unit rumah di Kelurahan Guguk Malintang, 20 unit rumah di Kelurahan Guguk Malintang, 20 unit rumah di Kelurahan Silaing Bawah, 20 unit rumah di Kelurahan Silaing Atas, 20 unit rumah di Kelurahan Koto Panjang, 20 unit rumah di Sigando.

4) Sasaran Strategis 4 : Menurunnya Angka Pengangguran

Angka Pengangguran cukup tinggi di Kota Padang Panjang, untuk itu perlu peningkatan efisiensi serta perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan minat kewirausahaan guna peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga hal tersebut secara langsung dapat menurunkan tingkat pengangguran. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Menurunnya Angka Pengangguran** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran masing-masing sebesar 73,29 % dengan kriteria cukup. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Sasaran Strategis 4 : Menurunnya Angka Pengangguran

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	

1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,35	110.12	4,72	6,44	73,29	4,34
----	------------------------------	------	------	--------	------	------	-------	------

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator **Menurunnya Angka Pengangguran** tidak mencapai melebihi target. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 73,29% dengan kriteria cukup. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja mencapai 10,12%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah 4,35, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera adalah 5,33 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional adalah 5,01. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang berada di bawah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional.

Namun jika dilihat dari ambang atas TPT dimana batas Tingkat Pengangguran Terbuka hanya 4% maka tingkat pengangguran Kota Padang Panjang berada di atas normal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran ini antara lain dengan pemberian pelatihan keterampilan, memperluas lapangan kerja, bantuan modal serta bantuan ekonomi produktif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui OPD teknis terkait. Kota Padang Panjang terdapat Balai Latihan Kerja telah dilakukan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja ini mereka nanti bisa berkerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang adalah :

1. Komitmen Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja
2. Adanya dukungan anggaran APBN sehingga jumlah pelatihan ketenagakerjaan yang dilaksanakan lebih banyak dan peserta yang mendapat pelatihan ketenagakerjaan juga meningkat.
3. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
4. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja

5. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek

5) Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baik melalui kebijakan nasional maupun daerah berupaya untuk menjadikan masyarakat diberdayakan sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 104.11% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Tar get	Reali sasi	% Capaian	Tar get	Reali sasi	% Capaian	
1.	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10.29	11.013	107.03	10.31	10.734	104.11	10.39

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Pengeluaran Perkapita Kota Padang Panjang adalah 10,734% lebih tinggi 0.42 % dibandingkan target yang hanya 10,31%. Dengan demikian capaian indikator ini tahun 2020 adalah 104,11% atau sudah melampaui target dengan kriteria sangat tinggi. Dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD, yang sebesar 10,39%, maka dapat dikatakan bahwa capaian ini sudah melampaui target sebesar 0,34%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan di berbagai lapangan usaha PDRB, sehingga ditengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Padang Panjang tetap dapat tumbuh di atas 5%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan

ekonomi Kota Padang Panjang didominasi oleh pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB dan ini menunjukkan terjadinya peningkatan daya beli masyarakat Kota Padang Panjang.

2. MISI II. MENINGKATKAN PEMERATAAN KUALITAS DAYA SAING SDM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA

Misi Kedua RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah **Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya**. Untuk mewujudkan misi kedua ini, pembangunan di Kota Padang Panjang diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan 2 (dua) tujuan. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian diuraikan sebagai berikut :

c. TUJUAN 3 : Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang Sehat, Berakhlak dan Unggul

Tujuan dari Misi 2 Pemerintah Kota Padang Panjang adalah Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul. Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan suatu negara. Kualitas sumber daya manusia diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi pencapaian dan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Tujuan III Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,25	78,00	99,68	78,86	77,93	98,82	80.72

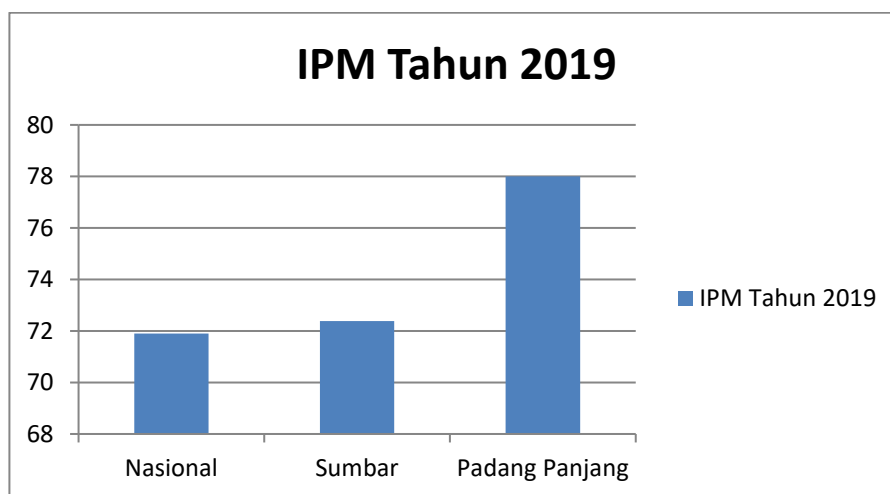
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator tujuan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul belum mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 98.82%

dengan kriteria sangat tinggi. Indikator ini menurun 0,86% dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja 99,68%.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*descent standart*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu : sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan rendah ($IPM < 60$). Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. Realisasi IPM Kota Padang Panjang termasuk kelompok tinggi ($70 \leq IPM < 80$). Dibandingkan dengan IPM Kota Padang Panjang tahun 2018 yaitu 77.30 dan pada tahun 2019 adalah sebesar 78,00 maka kenaikan IPM Kota Padang Panjang pada tahun 2019 adalah sebesar 0,70. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Tujuan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul tercapai dengan baik. Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.1
Perbandingan IPM Nasional, IPM Sumatera Barat dan IPM Kota Padang Panjang Tahun 2019



Apabila dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Nasional Tahun 2019 sebesar 71,92 maka Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2020 diatas IPM Nasional dan apabila dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebesar 72,39, maka Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2020 diatas IPM Provinsi Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,17 dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah ditahun 2019 menjadi 11,45
2. Meningkatkan harapan sekolah. Angka harapan sekolah di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,01 dibandingkan dengan harapan lama sekolah ditahun 2019 menjadi 15,05
3. Meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,05 dibandingkan dengan angka harapan hidup di tahun 2019 menjadi 72,77

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul** telah ditetapkan 2 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian dua sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

6) Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan

Pendidikan adalah bagian sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Karena pendidikan merupakan sebuah proses yang sistematis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam membangun negara. Bahkan dalam pengukuran indeks pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme*, pendidikan menjadi dimensi penting. Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan 2 indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat disuatu wilayah. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama

sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut. Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan** dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran masing-masing sebesar 95,95% dan 97,92% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing Pendidikan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Rata-rata Lama Sekolah	11,88	11,45	96,39	12,11	11,62	95,95	12,78
2.	Harapan Lama Sekolah	15,27	15,05	98,56	15,38	15,06	97,92	15,74

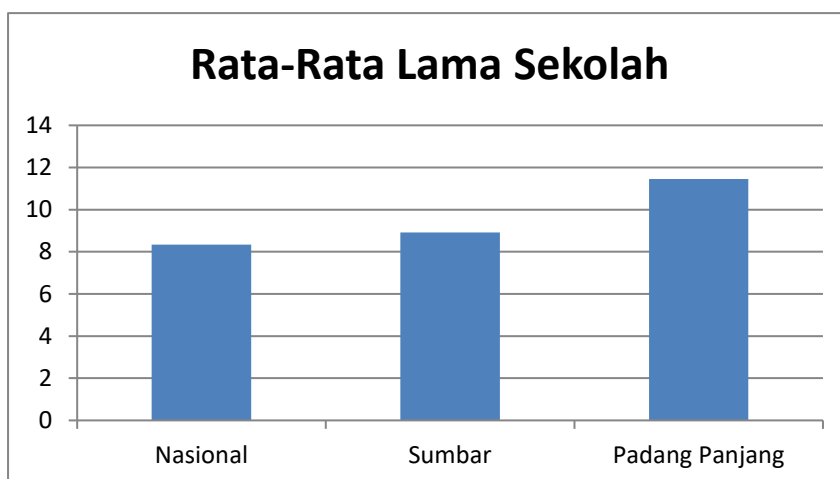
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak belum mencapai target. Capaian kinerja pada indikator Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 97,92% dengan kriteria sangat tinggi sedangkan capaian kinerja pada indikator Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019 sebesar 98,56% atau turun 0,64%.

Rata-rata lama sekolah Kota Padang Panjang pada tahun 2020 sebesar 11,62 lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi

Sumatera Barat yaitu sebesar 8,77 dan juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Nasional sebesar 7,89. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.2
Perbandingan Rata-rata lama Sekolah Nasional, Rata-rata lama Sekolah Sumatera Barat dan Rata-rata lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2019



Angka rata-rata lama sekolah di Kota Padang Panjang sangat erat kaitannya dengan capaian beberapa indikator berikut ini :

1. Berdasarkan data BPS Kota Padang Panjang Tahun 2019 Persentase penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah adalah 79.28 sedangkan dan tidak sekolah lagi adalah 20.72 dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok Umur	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
7-12	36.84	0.27
13-15	16.33	0.38
16-18	17.90	1.19
19-24	8.21	18.94
7-24	79.28	20.72

Hal ini mengindikasikan banyaknya persentase penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun sampai dengan kelompok umur 16-18 tahun lebih banyak yang masih bersekolah dibandingkan dengan tidak sekolah lagi. Sedangkan pada kelompok umur 19-24 lebih banyak yang tidak sekolah lagi dengan yang masih bersekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa

semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah partisipasi penduduk untuk bersekolah

2. Berdasarkan angka realisasi Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Kelompok	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat
APK	106,27	95,80	108,72
APM	99,12	78,91	74,58

Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya angka partisipasi penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan Kota Padang Panjang. Tingginya angka partisipasi penduduk usia sekolah dipengaruhi oleh tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

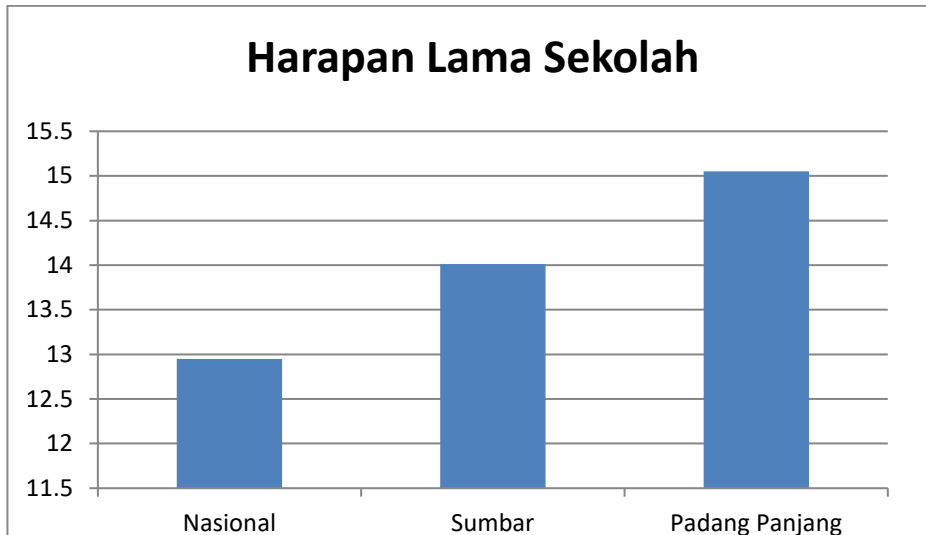
3. Berdasarkan realisasi Angka Putus Sekolah.

Angka Putus Sekolah di tingkat SD sebesar 0.18 SD dan angka putus sekolah SMP tahun sebesar 0.25 . Angka putus sekolah relatif sedikit karena kesadaran yang tinggi orang tua terhadap pendidikan anaknya. Di pihak sekolah, apabila terdapat murid putus sekolah maka kepala sekolah melakukan pendekatan persuasif dengan menjemput anak kerumah.

Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebesar 15,05. Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat adalah 14,01 sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah Nasional adalah 12.95. Dari data tersebut dapat diketahui Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang diatas rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.3

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Tingkat Nasional, Harapan Lama Sekolah Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2019



Hal yang mempengaruhi tingginya angka harapan lama sekolah di Kota Padang Panjang adalah :

1. Cara pandang masyarakat Kota Padang Panjang akan pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Jika kita melihat sejarah pada zaman dahulupun di Kota Padang Panjang telah berdiri pesantren-pesantren seperti Dinniyah Puteri dan Perguruan Thawalib yang menunjukkan betapa orang tua begitu peduli terhadap pendidikan anak-anaknya.
2. Tiinginya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dana pendidikan juga ditunjang oleh APBD Kota Padang Panjang dan APBN . seperti Bantuan Operasional Sekolah untuk jenjang SD, SLTP dan SLTA, Kartu Indonesia Pintar dan Beasiswa Bidik Misi.
3. Terdapatnya beberapa Perguruan Tinggi di Kota Padang Panjang seperti Universitas Muhammadiyah, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Akademi Kebidanan, Perguruan Dinniyah Puteri. Disamping itu jarak Kota Padang Panjang dengan ibukota Propinsi dan kota-kota disekitar Padang Panjang seperti Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar dimana kota-kota tersebut terdapat Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
4. Meningkatnya akses, sarana dan prasaranan serta mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah.

7) Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya yang berkesinambungan, terpadu dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian ibu, menurunnya angka kesakitan maupun angka kecacatan dan ketergantungan serta meningkatnya status gizi masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup adalah merupakan salah satu komponen pembentuk IPM untuk menggambarkan umur panjang dan hidup sehat. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100.48% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

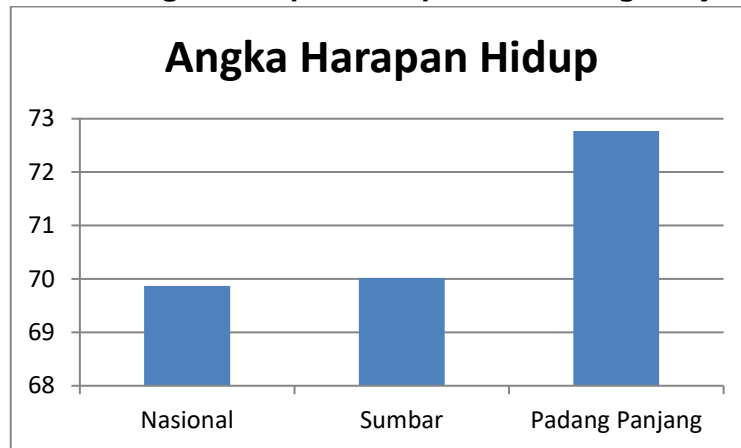
Tabel 3.16
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Angka Harapan Hidup	72,47	72,77	100,41 %	72,47	72,82	100,48 %	72,49

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat mencapai melebihi target. Capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100.48%. Target Indikator ini sama dengan tahun lalu yakni 72,47% dan mengalami peningkatan 0,05%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.4
Perbandingan Angka Harapan Hidup Nasional, Angka Harapan Hidup Sumatera Barat dan Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2019



Peningkatan Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang antara lain didukung oleh capaian indikator sebagai berikut :

1. Penurunan Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Padang Panjang pada tahun 2018 adalah 0 per 1000 lahir hidup sebanyak 1.033. Pada tahun 2019 capaian AKI adalah 0 per 1000 lahir hidup sebanyak 1.033. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan angka kematian ibu di Kota Padang Panjang pada tahun 2019 adalah :

- a. Adanya keterlibatan/peran masyarakat terhadap ibu hamil resiko tinggi.
- b. Meningkatnya pemanfaatan buku KIA (Kesehatan Ibu Anak) terutama difasilitas kesehatan, perlunya skrining PE (Penyelidikan Epidemiologi) di fasilitas kesehatan primer.
- c. Penempatan Bidan diseluruh Kelurahan (Bidan Puskesmas di Kota Padang Panjang, sehingga terpantau dan terawasinya kesehatan ibu hamil.
- d. Terlaksananya pelayanan ANC (Antenatal Care) Terpadu bagi ibu hamil yang berkualitas baik di fasilitas kesehatan Puskesmas maupun swasta yang dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang meliputi pelayanan KIA, gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular sehingga ibu hamil dan bersalin yang mengalami komplikasi mendapatkan penanganan tepat waktu.
- e. Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil disetiap wilayah Puskesmas yang bertujuan meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang pemeriksaan kehamilan agar Ibu dan janin sehat, persalinan aman, nifas nyaman ibu selamat sehingga kesadaran

masyarakat meningkat khususnya ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin serta bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Penurunan Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebesar 7 per 1000 kelahiran hidup. Capaian ini berada di atas target nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Target nasional Angka Kematian Bayi adalah 24 per 1.000 lahir hidup dan target Propinsi Sumatera Barat Angka Kematian Bayi adalah 24 per 1.000 lahir hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya angka kematian bayi di Kota Padang Panjang pada tahun 2019 adalah :

- a. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan asfiksia dan BBLR, penerapan standar rujukan asfiksia dan BBLR, peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan kehamilan dan janin melalui pelaksanaan kelas ibu hamil di masing-masing desa, pemberian buku pintar bagi calon pengantin bekerjasama dengan Kementerian Agama.
- b. Penempatan bidan di kelurahan sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan melalui pendidikan kesehatan dan konseling, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta melakukan deteksi dini untuk mengetahui resiko tinggi ibu hamil serta melakukan rujukan pada kasus-kasus gawat darurat.

3. Telah terakreditasinya seluruh fasilitas kesehatan di Kota Padang Panjang. Fasilitas Kesehatan di Kota Padang Panjang terdiri dari 4 Puskesmas dan 2 rumah sakit.

4. Persentase Universal Health Coverage (UHC)

Seiring dengan dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014 semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri dan Jamkesmas) diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), demikian pula dengan Program JK MPP dan JKSS. Pemerintah bertanggung jawab untuk membayar iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya dalam bentuk pengembangan sistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang didalamnya termasuk dalam sistem jaminan kesehatan. Berikut ini

data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Padang Panjang Per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Padang Panjang Per 31 Desember 2019

URAIAN	AKTIF
1. PBI APBN	12,212
Sub Total	12,212
2. PPU	
a. PNS	10,438
b. TNI/POLRI	1,501
c. Pejabat Negara	27
d. PPNPN	704
e. Pegawai Swasta	1,787
f. DPRD	66
Sub Total	14,523
3. BUKAN PEKERJA	
a. Investor	4
b. Pemberi Kerja	1
c. Penerima Pensiun	2,397
d. Veteran	95
e. Perintis Kemerdekaan	4
Sub Total	2,501
4. PBPU / PESERTA MANDIRI	7,207
Sub Total	7,207
5. PBI APBD	8,485
Sub Total	8,485
6. JKMP	10,038
Sub Total	10,038
TOTAL	54,966

Sumber Data: Aplikasi BI BPJS Kesehatan

Jumlah keseluruhan penduduk Kota Padang Panjang yang memiliki penjaminan kesehatan pra bayar adalah 54,966 jiwa dibandingkan jumlah penduduk Kota Padang Panjang 57.767 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 95.15% penduduk Kota Padang Panjang telah mendapatkan jaminan kesehatan.

d. Tujuan 4 : Terwujudnya Tataan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tenram dan Agamis

Tataan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis ditandai dengan berkurangnya pelanggaran-pelanggaran terkait penyakit masyarakat yang saat ini tengah merajalela dalam kehidupan masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Permasalahan sosial dan permasalahan penyakit masyarakat tentunya tidak lepas dari norma dan nilai agama yang berkembang dimasyarakat. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 102,80% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18

Tujuan 4 : Terwujudnya Tataan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tenram dan Agamis

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran ketenteraman dan Ketertiban Umum	96,37%	100 %	103,76	97,20%	100 %	105,80	100

Sumber Data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2019 Kota Padang Panjang (Data terbaru belum rilis)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencapai melebihi target. Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 103.76 %. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa membandingkan capaian kerjanya dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 56 kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum. Keseluruhan kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang tertuang dalam Perda tersebut telah ditangani dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor-faktor pendorong tertangani seluruh kasus trantibum adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
2. Terlaksananya operasi Pengamanan pemilu legislatif/ pilpres
3. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar
4. Perekrutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
5. Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota

8) Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak warga masyarakat antara lain rasa aman, tenang dan tertib sehingga terhindar dari perilaku negatif serta tidak bertanggung jawab oleh pelaku tindak kriminal atau tindak kejahatan yang berdampak kepada masyarakat secara umum. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim dan kondisi daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 102,80% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Tingkat	96,37	100	103,76	97,28	100	102,80	100

Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Tahun 2019 (Data terbaru belum rilis)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencapai melebihi target. Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 103.76 %. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa membandingkan capaian kinerjanya dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 56 kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum. Keseluruhan kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang tertuang dalam Perda tersebut telah ditangani dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Faktor-faktor pendorong tertangani seluruh kasus trantibum adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
2. Terlaksananya operasi Pengamanan pemilu legislatif/ pilpres
3. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar
4. Perekrutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
5. Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota

9) Sasaran Strategis 9 : Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 510,78% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Sasaran Strategis 9 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	2,34 %	10,42 %	445,29 %	2,04 %	10,42 %	19,58 %	1,50

Sumber Data: Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2019 (data terbaru belum rilis)

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Rumus : $(\text{Jumlah PMKS tahun } n - \text{Jumlah PMKS tahun } n-1) / \text{Jumlah PMKS tahun } n-1 \times 100$. Jumlah PMKS Tahun n (2019) adalah sebanyak 3.934 PMKS. Jumlah PMKS Tahun n-1 (2018) adalah sebanyak 4.392 PMKS. Berdasarkan perhitungan rumus diatas dapat diperoleh angka realisasi penurunan jumlah PMKS yaitu sebesar 10,42%

Pada tabel berikut ini dapat dilihat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Padang Panjang dari Tahun 2018-2019:

Tabel 3.21
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Padang Panjang dari Tahun 2018-2019:

No.	Jenis PMKS	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Anak Balita Terlantar	0	1
2	Anak Terlantar	26	19
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0	6
4	Anak Jalanan	0	0
5	Anak Dengan Kedisabilitas	79	51
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	0	0
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0

8	Lanjut Usia Terlantar	318	266
9	Penyandang Disabilitas	255	211
10	Tuna Susila	0	0
11	Gelandangan	1	0
12	Pengemis	5	3
13	Pemulung	5	1
14	Kelompok Minoritas	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	3	0
16	Orang Dengan HIV/AIDS	0	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	3	13
18	Korban Trafficking	0	0
19	Korban Kekerasan	0	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0
21	Korban Bencana Alam	0	0
22	Korban Bencana Sosial	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	279	259
24	Fakir Miskin	3414	2985
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4	3
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0
JUMLAH		4392	3818

Sumber Data : Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah PMKS di Kota Padang Panjang sebesar 10.42% pada tahun 2019. Dari 26 jenis PMKS, yang mengalami penurunan secara signifikan adalah jenis PMKS Fakir Miskin yaitu pada tahun 2018 tercatat terdapat 3.414 fakir miskin di Kota Padang Panjang dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2.985 fakir miskin yaitu turun sebanyak 429 fakir miskin.

Penurunan ini terjadi karena telah meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kota Padang Panjang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya rumah tangga miskin yang telah graduasi mandiri dari data kemiskinan, dengan kesadaran dan sukarela keluar dari data kemiskinan Kota Padang Panjang. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan jumlah PMKS di Kota Padang Panjang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan PMKS melalui pemberian bantuan pangan non tunai baik melalui dana APBD maupun dana APBN serta

2. Pengembangan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Perkotaan
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan
4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat dan pengembangan serta peningkatan kemandirian penyandang disabilitas berat melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan organisasi PPDI.
5. Meningkatkan produktifitas lansia melalui penyediaan kebutuhan dasar dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kelompok lansia di Kota Padang Panjang
6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana
7. Peningkatan kualitas penanganan dan pemberdayaan penyandang penyakit social
8. Peningkatan kualitas penanganan bagi anak jalanan melalui fasilitasi rumah singgah
9. Penjaringan para pelaku usaha dalam penanggulangan kesejahteraan social
10. Penyediaan data base kemiskinan

10) Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat

Sejalan dengan visi Padang Panjang yaitu “ Untuk Kejayaan Padang Panjang” dimana Kota Padang Panjang dijuluki Kota Serambi Mekkah. Dilihat dari sejarah, Padang Panjang dijuluki Kota Serambi Mekkah karena banyaknya pesantren dan sekolah agama yang berdiri di Kota Padang Panjang yang menghasilkan ulama-ulama terkenal seperti Buya Hamka, Zainuddin Labai El Yunussi dan Rahmah El Yunussyiah. Masyarakat Kota Padang Panjang menjalani kehidupan sesuai dengan sendi-sendi agama Islam dengan filosofi Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah. Sehubungan dengan itu dalam RPJMD Kota Padang Panjang menetapkan sasaran strategisnya yaitu Meningkatkan aktifitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan aktifitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 81,37% dengan kriteria cukup. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22

Sasaran Strategis 10 Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Aktifitas Kegiatan Keagamaan di masjid	38,82	46,04	118,59	56,58	46,04	81,37	100

Sumber Data : Bagian Kesra Setdako Padang Panjang Tahun 2019 (Data terbaru belum rilis)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator sasaran Meningkatkan aktifitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat mencapai melebihi target. Capaian kinerja untuk Indikator Persentase Aktifitas Kegiatan Keagamaan di Masjid pada tahun 2019 sebesar 118, 59 % .Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.23
Aktifitas Keagamaan Di Kota Padang Panjang

No	Kegiatan Keagamaan	Bentuk Pembinaan	Jumlah Masjid Keseluruhan /Tempat Kegiatan	Jumlah Masjid Pelaksana /Tempat Kegiatan	Persentase
1.	TPQ	1. Pelatihan dan Pembinaan Guru 2. Evaluasi kegiatan TPQ	38	21	55,26
2.	Wirid Remaja	1. Wirid pengajian 2. Malam Bina Iman dan Takwa 3. Jambore Remaja se Kota Padang Panjang	38	20	52,63
3.	Kampung Tahfiz	1. Kegiatan Hafalan Al Qur'an 2. Tahsinul Qur'an 3. Setoran Hafalan ayat Al-Qur'an	16	2	12,5
4.	Majelis Taklim	1. Ceramah Agama 2. Pendalaman materi agama melalui tanya jawab	38	11	39,28

5.	Subuh Mubarakah	1. Shalat Subuh berjamaah 2. Ceramah agama 3. Pendalaman materi tanya jawab 4. Informasi pembangunan daerah	38	11	39,28
6.	BP 4	1. Pendalaman pemahaman ajaran agama melalui wirid Kopri	24	24	100
		Rata-rata			49,82

Sumber Data : Bagian Kesra Setdako Padang Panjang Tahun 2019

Tercapainya kinerja pada sasaran ini disebabkan antara lain :

1. Taman Pendidikan Al Quran telah dilaksanakan pada setiap masjid, tetapi untuk kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Guru TPQ dan Evaluasi Kegiatan TPQ baru dilaksanakan pada 21 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang.
2. Wirid Remaja telah dilaksanakan pada 20 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang dengan kegiatan Wirid Pengajian, Malam Bina Iman dan Taqwa dan Jambore Remaja.
3. Kampung Tahfiz baru terselenggara sebanyak 2 kampung tahfiz yaitu di Kelurahan Sigando dan Kelurahan Pasar Usang yang dilaksanakan di Mesjid Asasi Sigando dan Mushalla Al Aqram. Peserta masing-masing Kampung Tahfiz adalah sebanyak 20 orang, berusia diantara 12 sampai dengan 20 tahun. Peserta dari kampung tahfiz melakukan pertemuan sekali seminggu dengan menyetorkan hafalan, tajwid dan tahsinul Alquran kepada pembimbingnya.
4. Majelis Taklim telah dilaksanakan pada 11 mesjid dengan kegiatan ceramah agama dan pendalaman materi tanya jawab agama.
5. Subuh Mubarakah telah dilaksanakan pada 11 mesjid dengan kegiatan Shalat Subuh Berjamaah, Ceramah Agama dan pendalaman materi melalui tanya jawab agama

6. Wirid Korpri dilaksanakan dua kali dalam sebulan untuk menambah pemahaman agama Aparatur Sipil Negara.
7. Muzakarah Ulama dilaksanakan sekali dalam setahun dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tema yang dimusyawarahkan adalah
 - a. Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam
 - b. Hukum aborsi dengan alasan darurat dan trauma pemerkosaan
 - c. Hukum Menggunakan Obat Penghambat Haid bagi Wanita saat Haji dan Umrah
 - d. Hukum Pewarisan anak dalam Kandungan, anak akibat Li'an, anak temuan dan anak angkat

Kegiatan tersebut diatas diharapkan dapat menambah pemahaman agama Islam dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari semua kalangan, sehingga julukan Kota Serambi Mekkah tetap disandang oleh Kota Padang Panjang. Program yang menunjang pencapaian sasaran ini adalah Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya.

Perbaikan dimasa depan untuk sasaran strategis ini adalah :

1. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Guru TPQ untuk dapat dilaksanakan kepada seluruh masjid di Kota Padang Panjang
2. Kegiatan Wirid Remaja dan kegiatan keagamaan lainnya untuk dapat dilaksanakan kepada seluruh masjid di Kota Padang Panjang.

3. MISI III. MENINGKATNYA TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL

Misi ketiga RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif". Untuk mewujudkan misi ini perlu dilakukan perubahan (reformasi) diberbagai sektor antara lain, reformasi birokrasi, reformasi manajemen sektor publik dan reformasi institusi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih" dan "Meningkatnya Partisipasi dan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan” sebagai tujuan untuk mencapai misi ketiga RPJMD Tahun 2018-2023. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut :

e. Tujuan 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik. Bagaimana kinerja birokrasi suatu pemerintahan daerah telah dikelola dengan baik dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian indikator kinerja pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.24
Tujuan 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	62	63,49	102,40	64	63,49	99,20	70

Sumber Data: Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2019 (Data terbaru belum rilis)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator tujuan **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar** mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99,20% dengan kriteria tinggi. Indikator ini mengalami penurunan tahun 2019 dengan capaian kinerja 102,40%.

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Untuk mengetahui indeks reformasi instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap penerapan reformasi birokrasi setiap tahunnya.

Indeks Reformasi Kota Padang Panjang diharapkan meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, indeks reformasi birokrasi tahun 2020 ditargetkan

64. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah 63.49 (kategori B) sebagaimana diuraikan pada tabel

Tabel 3.24

Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2019

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			Tahun 2018	Tahun 2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5	3.06	3.93
2	Penataan Peraturan Per Uuan	5	3.13	3.13
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	5.67	6
4	Penataan Tata Laksana	5	3.58	3.08
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	12.99	11.77
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3.00	4.38
7	Penguatan Pengawasan	12	4.80	6.66
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	4.54	4.57
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	40.76	43.53
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	8.22	8.22
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	6	3.00	3
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8.18	8.75
	Total Komponen Hasil (B)	40	19.9	19.97
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	60.15	63.49

Sumber Data : Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2019

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3.34 % dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan misi 2 tercapai dengan baik .

Dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, ada beberapa hambatan dan kendala yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Hambatan tersebut antara lain:

1. Masih rendahnya komitmen pimpinan terhadap perlunya melaksanakan reformasi birokrasi.
2. Kesulitan merubah mindset aparatur yang masih ingin dilayani bukannya ingin melayani.
3. Belum maksimal penerapan manajemen kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melakukan Bintek Reformasi Birokrasi kepada Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Menyusun Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Roadmap Reformasi Birokrasi.
3. Meningkatkan implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Kota Padang Panjang.
5. Mengikuti kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar** telah ditetapkan 2 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kedua sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

11) Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Pemerintah Daerah dilihat dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Diharapkan nilai Evaluasi SAKIP meningkat setiap tahunnya. Hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran daerah secara efektif dan efisien. Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian sistem pemerintahan.

Terdapat empat jenis opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat. Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini tertinggi yang di berikan BPK kepada instansi pemerintah. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran menunjukkan 1 (satu) indikator sebesar 100% dengan kriteria sangat tinggi dan 1 (satu) indikator sebesar 100 %. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.25
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (60,1)	B (60,64)	100	B (65)	B (60,64)	100	A (80,02)
2.	Opini BPK	WTP	WTP	10	WTP	WTP	10	WTP

Sumber Data :Setdako Padang Panjang, BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2019 (Data terbaru belum rilis)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 (dua) indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencapai target..Capaian kinerja untuk Indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sama jika dibandingkan tahun lalu. Mulai tahun 2019 nilai evaluasi SAKIP Kota Padang Panjang sudah dengan predikat B, dibandingkan tahun 2018 yang masih dengan predikat CC.

Hambatan peningkatan implementasi nilai SAKIP Tahun 2020 antara lain :

1. Cascading kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja di level OPD belum menyuruh dan berjenjang.
3. Kualitas analisis faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja pada Pelaporan Kinerja belum merata dan belum didukung dengan data yang andal

4. Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP masih belum merata.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada tahun yang akan datang adalah :

1. Melanjutkan penyempurnaan kualitas perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.
2. Menyempurnakan *cascade* kinerja yang komprehensif dan berjenjang sesuai dengan tingkatan unit kerja serta selaras dengan proses bisnis organisasi dan penganggarannya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, kegiatan, anggaran dan kinerja individu terhadap kinerja OPD.
3. Menyempurnakan kualitas rencana aksi pada seluruh perangkat daerah yang selaras dengan perbaikan *cascade* kinerja sehingga rencana aksi tersebut dapat dimanfaatkan OPD sebagai instrumen dalam pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala.
4. Meningkatkan kualitas informasi pelaporan kinerja oleh OPD melalui analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja, serta analisis efisiensi program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis.

Sedangkan untuk indikator Opini BPK, Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan Opini BPK tersebut adalah:

1. Rekonsiliasi data dengan OPD secara periodik
2. Melakukan sosialisasi mengenai kiat-kiat penyusunan Laporan Keuangan kepada seluruh PPK OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
3. Melakukan pendampingan secara khusus kepada masing-masing OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Padang Panjang
4. Melakukan koordinasi dengan BPK dalam penyusunan laporan

12) Sasaran Strategis 12 Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Melayani

Dalam mewujudkan *good governance*, pelayanan publik dituntut untuk mengarah pada pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan publik dijadikan salah satu indikator untuk dalam penyelenggaraan pemerintah. Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Padang Panjang telah dilakukan semenjak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Pelaksanaan survey dikoordinir oleh Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang. Pada tahun 2020 survey dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas. Hasil evaluasi capaian kinerja Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Melayani dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,43% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Melayani

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2023)
		Tar get	Realisa si	% Capaian	Tar get	Realisasi	% Capaian	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 (Baik)	85,76 (Baik)	109,95	79 (Baik)	88,62 (Baik)	112,18	82 (baik)

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencapai melebihi target. Capaian kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 sebesar 100,43% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 109,95%. Hasil survey menunjukkan bahwa dari 20 unit pelayanan, 5 unit pelayanan mendapatkan nilai Sangat Baik, 14 unit pelayanan mendapatkan nilai Baik dan 1 unit pelayanan mendapat nilai C sehingga capaian tahun 2020 rata-rata mencapai nilai interval sebesar 88,62 dengan Predikat Baik.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan terhadap pelayanan publik
2. Meningkatkan penerapan Standar Operasional Prosedur dan standar pelayanan pada OPD dan unit pelayanan.
3. Meningkatkan pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat kepada OPD disektor pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas prilaku dan keprofesional aparatur pemerintah.
5. Meningkatkan fasilitas yang menunjang pelayanan publik.

f. Tujuan 6 : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pembangunan suatu daerah tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah haruslah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pengecualian. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,43 % dengan kriteria tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Tujuan 6 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2,30	2,01	87,75	2,31	2,32	100,43	6,30

Sumber Data : Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator tujuan Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan belum mencapai target. Capaian kinerja untuk Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada tahun 2020 sebesar 100,43%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 87,75%. Perhitungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilihat dari keaktifan masyarakat dari keikutsertaan dalam kegiatan pembangunan pada masing-masing kelurahan. Kegiatan-kegiatan pembangunan di 16 kelurahan dan 2 kecamatan di Kota Padang Panjang adalah :

1. Gotong Royong rutin kelurahan
2. Pos Keamanan Lingkungan
3. Kehadiran masyarakat pada rapat-rapat kelurahan
4. Kehadiran masyarakat pada musrenbang RT
5. Kehadiran masyarakat pada musrenbang kelurahan
6. Kehadiran masyarakat pada musrenbang kecamatan
7. Keikutsertaan pada lomba-lomba
8. Keikutsertaan pada pertandingan-pertandingan olahraga.

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan** telah ditetapkan 2 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kedua sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

13) Sasaran Strategis 13 : Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Sesuai dengan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Berwenang untuk Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Menurut Asas desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam

pembangunan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja sebesar 133,33% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	70	100	142,86	75	100	133,33	90

Sumber Data: Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2019 (Data terbaru belum rilis)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan mencapai melebihi target. Indikator pada sasaran strategis ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong berhasilnya pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Aktifnya lembaga masyarakat yang ada pada masing-masing kelurahan dan kecamatan di Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Setiap kecamatan terdiri dari 8 kelurahan, pada setiap kecamatan dan kelurahan terdapat lembaga kemasyarakatan masing-masing terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Lembaga ini memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan.
 - b. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)
Forum ini mengantisipasi tindak kriminal dimasing-masing kelurahan dan kecamatan, monitoring kelapangan persudut kelurahan yang rawan kriminalitas dan mengaktifkan kembali Siskamling.

c. Rukun Tetangga

Organisasi masyarakat yang dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Organisasi ini juga memfasilitasi permasalahan kependudukan seperti perubahan Kartu Keluarga, pindah datang, kelahiran, kematian, pendataan masyarakat tidak mampu. Terdapat 125 RT pada Kecamatan Padang Panjang Barat dan 103 RT pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Organisasi masyarakat yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satu kegiatan PKK adalah memfasilitasi kegiatan Posyandu dan Dasa Wisma.

e. Karang Taruna

Merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial. Organisasi masyarakat ini memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada pada masing-masing kelurahan. Karang Taruna aktif dalam hal keolahragaan dan kepemudaan

2. Komitmen pimpinan dalam hal ini Camat dan Lurah merupakan hal sangat menentukan dalam meningkatkan keaktifan lembaga masyarakat pada masing-masing wilayahnya. Bagaimana seorang pimpinan dapat melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang berada pada kepemimpinannya.

14) Sasaran Strategis 14 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Konsep Pembangunan menempatkan manusia sebagai perspektif pembangunan dimana manusia selain berperan sebagai pelaku pembangunan juga menjadi fokus dan tujuan akhir proses pembangunan. Pembangunan yang dilakukan sejatinya tidak mengutamakan salah satu pihak dan mengesampingkan pihak lain sehingga terciptanya keselarasan dan

kesetaraan. Pembangunan gender bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski masih belum bisa menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Kota Padang Panjang selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Kota Padang Panjang, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu indeks pemberdayaan gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih focus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indikator ini merupakan adopsi dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang disusun oleh UNDP.

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 94,36 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.31
Sasaran Strategis 14
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	77,5	74,45	96,06	78,90	74,45	94,36	83,10

Sumber Data: Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2019 (Data terbaru belum rilis)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan belum mencapai target. Target tahun 2019 sebesar

77,5% dan meningkat tahun 2020 78,90%. Capaian kinerja untuk Indikator IDG Kota Padang Panjang Tahun 2019 dan 2020 sama yakni 74,45%.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase ekuivalen dengan distribusi merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Berikut ini capaian IDG beserta komposit Kota Padang Panjang tahun 2017-2018

Tabel 3.32
IDG Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018

No	Komposit	2017	2018
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	20.00	20.00
2	Perempuan sebagai tenaga profesional	65.00	59.75
3	Sumbangan Pendapatan Perempuan	46.52	46.63
	IDG	76.10	74.45

Sumber Data: Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2019 (Data tahun 2020 belum rilis)

Dari tabel di atas dapat diketahui IDG Kota Padang Panjang pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 76.10 pada tahun 2017 menjadi 74.45 pada tahun 2018, hal ini terutama terjadi karena penurunan dari persentase perempuan sebagai tenaga profesional yang mengalami penurunan sebesar 5.28 poin pada tahun 2018. Tenaga profesional mengalami penurunan dalam komposit IDG karena berkurangnya jumlah perempuan pada posisi kepala sekolah serta pejabat eselon. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai tenaga profesional adalah memberdayakan perempuan yang mempunyai kemampuan profesional di lembaga-lembaga formal.

Pada Bappeda Untuk mendukung pencapaian sasaran dilaksanakan melalui 8 (delapan) Program dengan 24 (dua puluh empat) Kegiatan yang ada pada BAPPEDA Kota Padang Panjang dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp.1.415.344.423,- dengan realisasi Rp.1.259.127.366,- atau 88,96%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk melihat capaian realisasi keuangan maka ada beberapa sasaran strategis yang dapat di rangkum dan dijadikan sebagai ukuran, yaitu :

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	BAPPEDA	1.415.344.423	1.259.127.366	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	639.550.923	602.422.242	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	137.061.064	126.696.465	100
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	164.210.520	161.085.060	100
		Penyediaan Makanan dan Minuman	20.182.189	20.169.450	100
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	167.021.000	153.839.248	100
		Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat	89.921.050	86.659.650	100
		Penyediaan Komponen Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	61.155.100	53.794.369	100
		Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	82.600.000	65.760.700	
		Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	82.600.000	65.760.700	100
		Pengembangan Data/Informasi	102.072.500	101.052.024	
		Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	6.397.500	5.525.800	100
		Sistem Informasi Manajemen Perencanaan	95.675.000	95.526.224	100
		Perencanaan Pembangunan Daerah	183.380.000	154.216.200	
		Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	3.025.000	2.844.900	100
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	14.935.000	8.815.750	100

1	2	3	4	5	6
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Perubahan	18.895.000	17.886.150	100
		Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai APBN	11.700.000	6.999.400	100
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD)	64.475.000	61.804.100	100
		Fasilitasi Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah	67.800.000	54.065.900	100
		Penyusunan Kalender Perencanaan	2.550.000	1.800.000	100
		Penelitian dan Pengembangan	0	0	
		Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis	0	0	100
		Perencanaan Sosial dan Budaya	98.615.000	86.316.200	
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	50.220.000	41.253.750	100
		Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	20.225.000	19.394.500	100
		Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan PUG	28.170.000	25.667.950	100
		Penguatan Inovasi Daerah	236.065.000	179.050.750	
		Penguatan Sistem Jaringan Inovasi Daerah	236.065.000	179.050.750	100
		Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	73.061.000	70.487.250	
		Fasilitasi Pelaksanaan SATIMISAKE	21.857.000	21.016.875	100
		Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi	10.004.000	8.778.700	100
		Pengembangan dan Updating GIS	41.200.000	40.691.675	100

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2020 sudah mencapai 100%, walau realisasi keuangan hanya 88,96%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara kuantitatif, kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik, dengan capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 100%. Sedangkan capaian kinerja keuangan mencapai 88,96%. Dari sisi keuangan, hal ini mengindikasikan terjadinya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan.

B. Saran

Dalam rangka menerapkan prinsip *Good Governance*, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, masih sangat diperlukan komitmen bersama dari seluruh *stakeholders*, khususnya konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan sebagaimana telah direncanakan dan disusun serta dituangkan dalam dokumen perencanaan, sehingga capaian kinerja kegiatan dapat diukur keberhasilannya.

Padang Panjang, 28 Februari 2021
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



RUSDianto, S.IP MM.

Pembina Utama Muda/NIP. 19640402 198602 1 003